

Tingkat Kesesuaian Lokasi *Shelter* Pedagang Kaki Lima di Kawasan Perkotaan Madiun

Suitability Level of Street Vendor Shelter Location in Madiun Urban Area

Choirun Nisa Nur Rahmadhani^{1*}, Murtanti Jani Rahayu^{1,2}, Erma Fitria Rini^{1,2}

¹Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

²Pusat Informasi Pembangunan Wilayah (PIPW), LPPM Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

*e-mail: choirunnisanur2001@gmail.com

(Received: 17 December, 2024; Accepted: 17 Januari 2025)

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), termasuk Pedagang Kaki Lima (PKL), memiliki peran signifikan dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan peluang pendapatan. Namun, pandemi Covid-19 telah berdampak negatif pada sektor ini, termasuk pada penurunan pendapatan. Pemerintah Kota Madiun merespons permasalahan dengan membangun *shelter* bagi PKL untuk meningkatkan ekonomi lokal juga estetika kota, meskipun terdapat tantangan seperti kesesuaian lokasi dan minat pengunjung. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian lokasi *shelter* PKL dengan karakteristik lokasi berdagang PKL di Kawasan Perkotaan Madiun. Di antara empat lokasi *shelter* PKL yang menjadi wilayah penelitian, *Shelter* Kembulsari, *Shelter* Rejomulyo, dan *Shelter* Kampir termasuk dalam kategori cukup sesuai sebagai lokasi *shelter* PKL, sementara *Shelter* Banjarejo termasuk dalam kategori kurang sesuai sebagai lokasi *shelter* PKL. Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti pentingnya kedekatan dengan aktivitas utama yang produktif dan aksesibilitas transportasi umum dalam menentukan kesesuaian lokasi *shelter* PKL. Fasilitas dasar yang memadai tidak cukup untuk menjamin keberhasilan jika lokasi tidak strategis dan sulit dijangkau oleh pelanggan. Oleh karena itu, perbaikan aksesibilitas dan pemilihan lokasi strategis menjadi kunci dalam meningkatkan daya tarik pengunjung, memastikan keberlanjutan usaha, serta mendorong stabilitas ekonomi PKL di Kawasan Perkotaan Madiun.

Kata kunci: kesesuaian lokasi; Pedagang Kaki Lima; PKL; *shelter* PKL

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), including street vendors, play a significant role in Indonesia's economy, especially in creating employment and income opportunities. However, the Covid-19 pandemic has negatively impacted this sector, including a decrease in income generation. The Madiun City government responded to this problem by building shelters for street vendors to improve the city's local economy as well as aesthetics, although challenges such as location suitability and visitor interest remain. This study aims to evaluate the suitability of street vendor shelter locations with the characteristics of street vendor trading location in the Madiun Urban Area. Among the four street vendor shelter locations analyzed in this research, Kembulsari Shelter, Rejomulyo Shelter, and Kampir Shelter are classified into the moderately suitable category as street vendor shelter locations. Meanwhile, Banjarejo Shelter is classified into the less suitable category as a street vendor shelter location. Overall, this study highlights the importance of proximity to major productive activity locations and public transport accessibility in determining the suitability of street vendor shelter locations. Adequate basic facilities are not enough to guarantee success if the location is not strategic and difficult to be reached by customers. Therefore, improved accessibility and strategic location selection are key in attracting potential costumers, ensuring business sustainability, and promoting the economic stability of street vendors in Madiun Urban Area .

Keywords: location suitability; street vendors; street vendor shelters

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan perekonomian berkembang memiliki fondasi ekonomi yang masih tergolong lemah. Salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat ekonomi nasional adalah dengan mempertimbangkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki peranan penting dalam ekonomi Indonesia yang terbukti mampu bertahan dan menjadi penggerak ekonomi, terutama setelah terjadinya krisis ekonomi (Sedyastuti, 2018).

UMKM dapat digolongkan menjadi berbagai kriteria, salah satunya adalah *livelihood activities*, yaitu kegiatan yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, juga disebutkan bahwa UMKM berperan dalam menunjang penghidupan melalui sektor informal, salah satu bentuknya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Sebagai bagian dari sektor informal, PKL berfungsi sebagai unit yang terlibat dalam produksi barang atau jasa untuk menciptakan lapangan kerja serta pendapatan (Febrianto, 2020).

Namun, perkembangan UMKM mengalami penurunan pada awal tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Pandemi ini memberikan dampak signifikan terhadap penurunan perputaran ekonomi, termasuk pada sektor informal seperti PKL (Firdaus *et al.*, 2020). PKL mengalami omset penjualan serta permintaan dari masyarakat yang menurun drastis. Selain itu, PKL masih harus berjuang untuk membayar harga sewa lokasi berdagang yang menjadi salah satu faktor banyaknya sektor informal terpaksa gulung tikar pada masa pandemi. Dalam situasi ini, diperlukan langkah-langkah pemerintah untuk mengontrol sektor ekonomi.

Pemerintah Kota Madiun telah mengambil berbagai inisiatif untuk meningkatkan perekonomian pasca pandemi, termasuk dengan mengoptimalkan keberadaan PKL. Saat ini, PKL di Kota Madiun tersebar di area pasar tradisional, trotoar, serta jalanan utama yang ramai. Namun, Kota Madiun belum memiliki lokasi sentra PKL yang khusus sehingga aktivitas perdagangan sektor informal ini sering kali menyebabkan kemacetan lalu lintas, mengganggu mobilitas warga, dan merusak estetika kota. Sebagai respons terhadap situasi ini, serta untuk mengatasi dampak pandemi dan memperbaiki estetika kota, Pemerintah Kota Madiun merencanakan program pengembangan sektor informal termasuk pengembangan PKL. Upaya ini dituangkan dalam Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2020 tentang Masterplan *Smart City* Kota Madiun Tahun 2019–2024. Masterplan tersebut mencakup program pembangunan sarana bagi PKL yang bertujuan untuk menciptakan sentra PKL sehingga mereka tidak berjualan sembarangan di trotoar dan pinggir jalan yang ramai. Program ini juga diharapkan dapat memperbaiki estetika kota dengan menyediakan lokasi berdagang yang lebih teratur bagi PKL. Untuk merealisasikan program ini, Pemerintah Kota Madiun membangun 27 titik *shelter* di setiap taman kelurahan di Kawasan Perkotaan Madiun.

Shelter yang menjadi ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah *Shelter* Kembulsari, *Shelter* Rejomulyo, *Shelter* Kampir, dan *Shelter* Banjarejo. *Shelter-shelter* ini dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti listrik, toilet, tempat sampah, air bersih, dan lahan parkir, serta tidak dikenakan retribusi sehingga memungkinkan PKL untuk fokus meningkatkan ekonomi mereka. Meskipun demikian, realisasi program ini menghadapi tantangan. Beberapa PKL yang telah memiliki tempat berjualan enggan pindah ke *shelter* yang disediakan meskipun fasilitas sudah lengkap dan retribusi telah dihapus. Selain itu, beberapa *shelter* kurang diminati pengunjung karena pengunjung lebih tertarik ke lokasi lain.

Sebagian besar penelitian sebelumnya yang terkait PKL berfokus pada kesesuaian lokasi atau penataan lokasi PKL, termasuk stabilisasi lokasi, karakteristik lokasi, preferensi pedagang, serta pengaruh lokasi terhadap sosial dan ekonomi (Amalia *et al.*, 2023; Demas & Dewanti, 2021; Nazihah *et al.*, 2024; Perdana *et al.*, 2020). Namun, studi yang secara spesifik mengevaluasi hubungan antara lokasi *shelter* PKL dengan karakteristik lokasi berdagang PKL di Kawasan Perkotaan Madiun masih terbatas. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kesesuaian lokasi *shelter* PKL, serta mengkaji efektivitasnya dalam mendukung aktivitas ekonomi PKL di Kawasan Perkotaan Madiun.

2. KAJIAN TEORI

2.1. SEKTOR INFORMAL DAN KARAKTERISTIK SEKTOR INFORMAL

Sektor informal adalah bagian ekonomi yang mencakup entitas tidak tunduk pada regulasi hukum atau pajak pemerintah yang berfokus pada produksi barang dan jasa untuk menciptakan lapangan kerja dan pendapatan. Sektor ini ditandai oleh hubungan kerja yang bersifat sosial dan pribadi, tanpa perjanjian formal atau jaminan, seperti jaminan sosial atau pajak penghasilan (Febrianto, 2020). Karakteristik sektor informal meliputi pola kegiatan yang tidak konsisten, penggunaan teknologi sederhana, dan struktur organisasi berbasis keluarga. Sektor ini biasanya memiliki jadwal kerja tidak teratur, tempat kerja tidak menetap, dan melayani kelompok terbatas tanpa persyaratan pendidikan formal (Dewi *et al.*, 2020). Sektor informal sering kali memiliki hasil yang kecil, tidak tersentuh oleh peraturan pemerintah, dan tempat usaha yang tidak permanen (Lahengko & Suryono, 2023). Sektor ini fleksibel dalam menyerap tenaga kerja dengan berbagai tingkat pendidikan tanpa membutuhkan keahlian khusus (Riyanto, 2020). Sektor informal memainkan peran penting dalam ekonomi, terutama dalam menyediakan lapangan kerja bagi kelompok berpendapatan

rendah dan mereka yang memiliki akses terbatas ke sektor formal. Meskipun bersifat tidak formal dan sering kali tidak teratur, sektor ini krusial dalam konteks ekonomi negara berkembang.

2.2. PEDAGANG KAKI LIMA SEBAGAI SEKTOR INFORMAL

Pedagang Kaki Lima atau PKL didefinisikan sebagai individu yang menawarkan produk berupa barang dan jasa, serta berlokasi di tepi jalan (Bromley, 2000). Istilah PKL berasal dari trotoar yang dulunya lebarnya 5 kaki, atau kira-kira 1 koma 5 meter, jadi dalam pengertian ini, PKL mengacu pada pedagang yang mendirikan toko di tempat umum, biasanya di trotoar di depan toko atau pasar, sekolah, atau bioskop (Widodo, 2000). PKL merujuk kepada individu yang berusaha mengembangkan usaha dengan menjajakan barang atau jasa walaupun dengan modal sedikit (Rudi, 2023). McGee & Yeung (1977) mendefinisikan pedagang asongan sebagai sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual di ruang publik, khususnya di pinggir jalan dan trotoar, dan mereka menggunakan definisi ini untuk menggambarkan Pedagang Kaki Lima.

2.3. KARAKTERISTIK AKTIVITAS PEDAGANG KAKI LIMA

PKL merupakan bagian penting dari sektor informal yang menunjukkan karakteristik khusus dalam aktivitasnya. Menurut McGee & Yeung (1977), waktu berdagang PKL dipengaruhi oleh ritme kehidupan masyarakat dan aktivitas formal di sekitarnya. Waktu tersibuk PKL sering bertepatan dengan jam ramai di area perumahan, perkantoran, dan rekreasi, seperti pagi hingga siang hari di pasar atau saat jam istirahat di pusat kota. Jenis dagangan PKL bervariasi berdasarkan lingkungan tempat mereka beroperasi, meliputi makanan mentah dan siap saji, barang non-makanan seperti pakaian, serta layanan seperti perbaikan sol sepatu dan pemotongan rambut (McGee & Yeung, 1977). Sarana fisik untuk berdagang juga beragam, mulai dari meja, pikulan, keranjang, lapak, gerobak, warung semi permanen, hingga kios (Setyaningrum *et al.*, 2021). Sarana ini menunjukkan fleksibilitas dan adaptasi PKL terhadap kondisi dan kebutuhan lokasi berdagang. Pola sebaran aktivitas PKL dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pola mengelompok (*focus agglomeration*) dimana PKL berkumpul di ujung jalan, ruang terbuka, atau sekitar pasar, dan pola memanjang (*street concentration*) yang terjadi di sepanjang jalan utama atau penghubung, ditentukan oleh aksesibilitas tinggi di lokasi tersebut (McGee & Yeung, 1977). PKL juga dikategorikan berdasarkan pola pelayanan mereka, yaitu pedagang menetap (*static hawkers*) yang menggunakan kios permanen, pedagang semi permanen (*semistatic hawkers*) yang menggunakan kios beroda, dan pedagang keliling yang berpindah-pindah dengan gerobak atau kendaraan lainnya. Pembagian ini menunjukkan keberagaman dalam cara PKL menyediakan barang dan jasa kepada konsumen.

2.4. KARAKTERISTIK LOKASI BERDAGANG PEDAGANG KAKI LIMA

Pengelolaan PKL oleh pemerintah kota merupakan upaya perencanaan kota yang berkelanjutan dan wilayah yang stabil (Rahayu *et al.*, 2020). Pemerintah menyediakan *shelter* bagi PKL di taman kota sebagai bentuk pemerataan pembangunan dan pengelolaan sektor informal. Menurut McGee & Yeung (1977), PKL cenderung beroperasi di lokasi dengan kepadatan penduduk tinggi atau area komersial, seperti pusat kota, tempat hiburan, pasar umum, terminal, dan area komersial untuk menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan. Hong Kong dan Singapura mengarahkan PKL terkonsentrasi di daerah dengan populasi padat. Widodo (2000) mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi berdagang PKL. Pertama, lokasi yang strategis dan dekat dengan pusat kota atau aktivitas formal, yang menarik banyak pelanggan. Kedua, lokasi yang dekat dengan tempat tinggal PKL untuk mengurangi biaya transportasi. Ketiga, lokasi yang mudah dicapai lokasi dengan transportasi umum. Keempat, lokasi beroperasi yang berkelompok dengan penjual serupa, yang menciptakan aglomerasi sehingga menarik lebih banyak pelanggan.

Stabilisasi PKL adalah penataan PKL dimana PKL diizinkan menetap di lokasi usahanya saat ini atau sama dengan sebelumnya, dengan diberikan legalitas, diatur secara tertib, dan sering kali difasilitasi dengan *shelter* atau penataan estetika agar tidak mengganggu fungsi kota (Rahayu, 2020). Lokasi stabilisasi PKL memerlukan perhatian pada jarak dari aktivitas utama dan tempat tinggal. Rahayu (2020) mengemukakan bahwa jarak yang ideal untuk lokasi stabilisasi PKL dari aktivitas utama adalah 25 - 50 m, dan jarak dari rumah berkisar antara 400-1.000 m. PKL sering memilih lokasi dekat rumah untuk mengurangi biaya transportasi. Selain itu, kedekatan dengan zona perdagangan, pendidikan, permukiman, dan rekreasi juga penting karena lokasi ini cenderung menarik lebih banyak pengunjung (Rahayu *et al.*, 2020). Jenis jalan juga memengaruhi lokasi stabilisasi PKL, dengan preferensi pada jalan kolektor atau jalan lingkungan dengan aktivitas tinggi (Rahayu *et al.*, 2020). Di Kota Surakarta, lokasi stabilisasi PKL sering ditemukan di zona perdagangan dan jasa, permukiman, serta rekreasi. Di Kota Semarang, PKL cenderung menempati zona rekreasi, pendidikan, dan perkantoran, serta menggunakan ruang terbuka seperti taman (Rahayu *et al.*, 2019; Widjajanti &

Wahyono, 2018). Ruang publik dengan aktivitas campuran memungkinkan PKL mendapatkan lebih banyak pelanggan (Widjajanti *et al.*, 2017).

Fasilitas dasar yang lengkap adalah karakteristik penting dari lokasi stabilisasi PKL. Fasilitas dasar tersebut meliputi kios, toilet, musala, air bersih, penerangan, dan tempat sampah. Fasilitas ini mendukung operasional PKL dan menjaga kebersihan lokasi berdagang. Air bersih dan fasilitas sanitasi menjadi sangat penting bagi PKL yang menjual makanan dan minuman (Kristian, 2021; Rahayu, 2020; Sriharyati & Marlina, 2021). Penyediaan jaringan drainase, jaringan air bersih, dan layanan listrik, sangat diperlukan oleh PKL, terutama yang beroperasi pada malam hari (Nisa, 2021). Keberadaan tempat sampah dan sistem pembuangan limbah yang baik mendukung kebersihan dan kenyamanan di lokasi berdagang. Penerangan yang memadai penting untuk keamanan dan kenyamanan PKL dan pelanggan, terutama di malam hari Adonis (2023) Secara keseluruhan, pemilihan lokasi berdagang PKL sangat bergantung pada faktor aksesibilitas, kedekatan dengan aktivitas utama, keamanan, dan fasilitas pendukung.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif yang berawal dari teori umum untuk menghasilkan hipotesis spesifik tentang kesesuaian lokasi *shelter* PKL di Kawasan Perkotaan Madiun. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif yang melibatkan pengumpulan dan analisis data numerik untuk memahami fenomena yang diteliti. Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan teknik analisis skoring untuk menilai kesesuaian lokasi *shelter* PKL berdasarkan karakteristik lokasi berdagang yang ideal bagi PKL.

Hasil analisis skoring diklasifikasikan untuk menentukan tingkat kesesuaian lokasi *shelter* PKL di Kawasan Perkotaan Madiun. Setiap lokasi *shelter* akan diidentifikasi dan dilakukan analisis skoring sesuai dengan bobot indikator dikali dengan skor parameter. Penilaian kesesuaian lokasi *shelter* PKL di Kawasan Perkotaan Madiun dilakukan dengan menjumlahkan seluruh nilai skor indikator penelitian. Total keseluruhan nilai indikator akan disandingkan dengan klasifikasi kesesuaian berdasarkan Tabel 1. Nilai yang diberikan untuk setiap indikator dalam penelitian ini menggunakan skala Guttman sehingga akan mendapatkan pernyataan yang tegas terhadap kuesioner yang telah diberikan (Mandasari *et al.*, 2020). Pemberian skor indikator dalam penelitian ini akan didasarkan pada sesuai atau tidaknya indikator tersebut terhadap parameter yang telah disusun oleh peneliti. Dalam tahap ini, setiap indikator akan disandingkan dengan parameter yang telah disusun sebelumnya untuk diberi skor yang kemudian dikalikan dengan bobot indikator. Tabel 2 merupakan skor yang digunakan untuk setiap indikator.

Tabel 1. Klasifikasi Kelas Kesesuaian Lokasi Shelter PKL

Klasifikasi	Rentang Skor
Sesuai	3,1-4,00
Cukup Sesuai	2,1-3,00
Kurang Sesuai	1,1-2,00
Tidak Sesuai	0-1,00

Tabel 2. Skoring Variabel dan Indikator Kesesuaian Lokasi Shelter PKL di Kawasan Perkotaan Madiun

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Bobot Indikator	Parameter	
				Sesuai (1)	Tidak Sesuai (0)
Kedekatan dengan aktivitas utama	-	Jarak aktivitas utama dekat lokasi berdagang PKL	1	Lokasi berdagang PKL berjarak 0-50 meter dengan berbagai jenis aktivitas utama yang berada di sekitar lokasi	Lokasi berdagang PKL berjarak 50-100 meter dengan berbagai jenis aktivitas utama yang berada di sekitar lokasi
	-	Ketersediaan trayek transportasi umum menuju lokasi berdagang PKL	0,5	Lokasi berdagang PKL dilalui oleh transportasi umum	Lokasi berdagang PKL tidak dilalui oleh transportasi umum
Aksesibilitas	-	Jangkauan sarana pendukung berupa halte atau terminal di sekitar lokasi berdagang PKL	0,5	Terdapat halte atau terminal yang dapat dicapai dengan berjalan kaki sejauh maksimal 400 meter	Tidak terdapat halte atau terminal yang dapat dicapai dengan berjalan kaki sejauh maksimal 400 meter

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Bobot Indikator	Parameter	
				Sesuai (1)	Tidak Sesuai (0)
Keamanan Lokasi		Lokasi aman dari relokasi setiap saat karena lokasi telah ditentukan oleh pemerintah	0,5	Lokasi berdagang PKL sudah ditentukan oleh pemerintah	Lokasi berdagang PKL bukan ditentukan oleh pemerintah
	-	Lokasi aman dari tindak kriminalitas	0,5	Tidak pernah terjadi tindak kriminalitas pada kawasan lokasi berdagang PKL	Sering terjadi tindak kriminalitas pada kawasan lokasi berdagang PKL
Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pendukung	Tempat sampah	Ketercukupan tempat sampah	0,2	Memiliki tempat sampah dengan kapasitas volume minimal 40 L per PKL	Memiliki tempat sampah dengan kapasitas volume kurang dari 40 L per PKL
	Air bersih	Ketercukupan kuantitas air bersih	0,2	Jumlah air yang tersedia memenuhi standar 5 liter/m ² luasan kios	Jumlah air yang tersedia tidak memenuhi standar minimal 5 liter/m ² luasan kios
	Listrik	Ketercukupan daya listrik	0,2	Kapasitas daya listrik yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan aktivitas berdagang PKL	Kapasitas daya listrik yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan aktivitas berdagang PKL
	Toilet	Ketercukupan kebutuhan toilet	0,2	Toilet yang tersedia memenuhi standar yaitu dengan asumsi perhitungan 1 (satu) toilet untuk 40 orang	Toilet yang tersedia memenuhi standar yaitu dengan asumsi perhitungan 1 (satu) toilet untuk 40 orang
	Lahan parkir	Ketercukupan lahan parkir	0,2	Luas lahan parkir yang disediakan minimal 59 SRP per 1.000 m ² dari total luasan lokasi <i>shelter</i> PKL	Luas lahan parkir yang disediakan kurang dari 59 SRP per 1.000 m ² dari total luasan lokasi <i>shelter</i> PKL

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 KESESUAIAN *SHELTER* KEMBULSARI SEBAGAI LOKASI *SHELTER* PKL DI KAWASAN PERKOTAAN MADIUN

Hasil penelitian tentang kesesuaian *Shelter* Kembulsari sebagai lokasi *shelter* PKL di kawasan perkotaan Madiun menunjukkan bahwa meskipun *shelter* ini memiliki sejumlah fasilitas fisik yang lengkap dan mendukung, seperti kios, fasilitas air bersih, listrik, serta tempat sampah yang memadai, lokasinya yang dekat jalan kolektor dengan kecepatan kendaraan yang tinggi mengurangi kemungkinan kendaraan berhenti dan pengunjung datang.

Shelter Kembulsari dilalui oleh angkutan kota dan bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Namun, bus AKDP jarang berhenti, yang menunjukkan bahwa aksesibilitas *shelter* ini masih kurang optimal. Meskipun terletak di area dengan aktivitas utama seperti perkantoran dan pergudangan, jarak terdekat dari aktivitas utama ini adalah 55 meter untuk perkantoran dan 80 meter untuk pergudangan sehingga keberadaan *shelter* ini tidak optimal untuk menarik pengunjung dari aktivitas tersebut. Namun, keamanan di *Shelter* Kembulsari cukup terjamin berkat patroli malam yang dilakukan oleh PKL dan adanya dukungan dari sistem keamanan di sekitarnya.

Tabel 3 menyajikan analisis skoring kesesuaian *Shelter* Kembulsari sebagai lokasi *shelter* PKL. Total keseluruhan skor indikator pada lokasi *Shelter* Kembulsari adalah 2,5 yang berada dalam rentang skor 2,1 - 3 sehingga dikategorikan sebagai cukup sesuai sebagai lokasi *shelter* PKL. Meskipun lokasi ini memiliki kesesuaian pada aksesibilitas transportasi umum dan kelengkapan sarana-prasarana, seperti tempat sampah, air bersih, listrik, toilet, dan lahan parkir, terdapat beberapa kekurangan yang memengaruhi tingkat kesesuaiannya. Kekurangan utama terletak pada kedekatan dengan aktivitas utama dan kurangnya halte atau terminal dalam radius yang dapat dijangkau pejalan kaki. Hal ini

menunjukkan bahwa meskipun fasilitas fisik cukup mendukung, konektivitas dan kedekatan lokasi dengan aktivitas utama masih perlu ditingkatkan untuk mencapai tingkat kesesuaian yang lebih optimal.

Tabel 3. Analisis Skoring Kesesuaian Shelter Kembulsari sebagai Lokasi Shelter PKL

Variabel	Indikator	Hasil Analisis Peneliti	Bobot Indikator	Skor Parameter	Skor Variabel
Kedekatan dengan aktivitas utama	Jarak aktivitas utama yang didekati lokasi berdagang PKL	Aktivitas utama terdekat yakni lahan pertanian dengan jarak 30 m dari lokasi <i>shelter</i> . Terdapat aktivitas perkantoran dengan jarak 55 m serta aktivitas perdagangan yang berjarak 80 m dari lokasi <i>shelter</i> . Aktivitas utama yang didekati oleh Shelter Kembulsari memiliki jarak 55 m dan 80 m.	1	0	0
	Ketersediaan trayek transportasi umum menuju lokasi berdagang PKL	Jalan kolektor yang melalui <i>Shelter</i> Kembulsari merupakan bagian dari rute angkutan Kota Madiun kode trayek AA, BB, dan CC.	0.5	1	0.5
Aksesibilitas	Jangkauan sarana pendukung berupa halte atau terminal di sekitar lokasi berdagang PKL	Tidak terdapat halte dan terminal yang dapat ditempuh dengan jalan kaki sejauh 400 m	0.5	0	0
	Lokasi aman dari relokasi setiap saat karena lokasi telah ditentukan oleh Pemerintah	Lokasi <i>Shelter</i> Kembulsari telah termasuk dalam realisasi pembangunan <i>shelter</i> yang dilakukan di 9 Kelurahan di wilayah Kecamatan Kartoharjo (Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Masterplan Smart City Kota Madiun Tahun 2019-2024)	0.5	1	0.5
Keamanan Lokasi	Lokasi aman dari tindak kriminalitas	Lokasi tergolong aman karena tidak pernah mengalami tindak kriminalitas	0.5	1	0.5
	Ketersediaan tempat sampah	Timbulan sampah yang dihasilkan kurang lebih 100 liter per hari. Kapasitas gerobak sampah 840 liter. Ketersediaan tempat sampah di <i>Shelter</i> Kembulsari telah mencukupi.	0.2	1	0.2
Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pendukung	Ketersediaan kuantitas air bersih	Air bersumber dari PDAM, memenuhi kebutuhan air untuk aktivitas berdagang PKL sehari-hari pada <i>Shelter</i> Kembulsari.	0.2	1	0.2
	Ketersediaan daya listrik	Tidak pernah terjadi pemadaman ketika peralatan listrik digunakan secara bersamaan. Ketersediaan daya listrik sudah mencukupi. Terdapat dua toilet pada <i>Shelter</i> Kembulsari.	0.2	1	0.2
	Ketersediaan kebutuhan toilet	Ketersediaan toilet di <i>Shelter</i> Kembulsari mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari para pedagang dan pengunjung <i>Shelter</i> Kembulsari menyediakan lahan parkir 100 SRP untuk kendaraan roda dua atau 13 SRP kendaraan roda empat dalam satu waktu. Standar minimal SRP untuk 1.000 m ²	0.2	1	0.2
	Ketersediaan lahan parkir	lahan yakni 59 SRP. <i>Shelter</i> Kembulsari dengan total luas 1.700 m ² harus menyediakan minimal 100 SRP. Lahan parkir pada <i>Shelter</i> Kembulsari telah mencukupi kebutuhan lahan parkir untuk aktivitas berdagang PKL sehari-hari	0.2	1	0.2
Total					2.5
Klasifikasi Kesesuaian					Cukup Sesuai

Dengan 5 pedagang yang menempati kios-kios di *shelter* ini, tingkat produksi sampah harian yang dihasilkan sekitar 100 liter dengan sistem pengelolaan sampah yang memadai. Kebutuhan air bersih untuk keperluan memasak, kebersihan, dan toilet dipenuhi dengan baik melalui pasokan PDAM meskipun jumlah air yang disediakan tidak diketahui

secara pasti. Fasilitas listrik stabil dengan daya 450 watt per kios mendukung operasional harian para PKL. Dua toilet yang ada mampu melayani hingga 100 pengunjung sehari cukup untuk memenuhi kebutuhan sanitasi. *Shelter* ini juga memiliki lahan parkir yang luas, mampu menampung hingga 100 kendaraan roda dua atau 13 kendaraan roda empat, yang sesuai dengan standar minimal Satuan Ruang Parkir (SRP) untuk luas area 1.700 m². Secara keseluruhan, *Shelter* Kembulsari memiliki fasilitas yang cukup memadai untuk operasional PKL. Namun, lokasinya yang dekat dengan jalan kolektor dengan arus lalu lintas cepat serta jarak dari aktivitas utama mengurangi potensi kunjungan meskipun keamanan dan fasilitas lainnya sudah cukup memadai.



Gambar 1. Peta Lokasi *Shelter* Kembulsari



Gambar 2. Fasilitas Pendukung di *Shelter* Kembulsari

4.2 KESESUAIAN *SHELTER* REJOMULYO SEBAGAI LOKASI *SHELTER* PKL DI KAWASAN PERKOTAAN MADIUN

Hasil penelitian tentang kesesuaian *Shelter* Rejomulyo sebagai lokasi *shelter* PKL di Kawasan Perkotaan Madiun menunjukkan bahwa *shelter* ini berada dalam lingkungan permukiman dengan tingkat keramaian aktivitas yang rendah sehingga potensi kunjungan masyarakat juga relatif rendah. Meskipun demikian, para PKL yang berdagang di *shelter* ini memilih untuk berdagang sepanjang hari dari pukul 06.00 hingga 18.00 WIB dengan asumsi kebutuhan masyarakat terhadap makanan dan minuman siap saji akan tetap ada sepanjang waktu. *Shelter* ini memiliki kios-kios dengan ukuran 3x3 m². PKL yang berdagang disana tidak dikenakan retribusi oleh pemerintah, dan hanya membayar biaya pemeliharaan, kebersihan, serta kebutuhan air dan listrik.

Shelter Rejomulyo dilalui oleh jalan lokal yang menghubungkan antar permukiman di Kelurahan Rejomulyo dan tidak dilalui oleh layanan angkutan kota yang mengurangi aksesibilitas dan potensi kunjungan. Keamanan di *shelter* ini terbilang baik, dengan PKL yang saling menjaga keamanan dan belum pernah terjadi tindak kriminalitas. *Shelter* ini diisi delapan pedagang dengan fasilitas fisik yang mencakup kios, gerobak, dan kontainer, serta tempat sampah dengan kapasitas total sekitar 460 liter, yang mencukupi untuk menampung timbulan sampah harian sekitar 180 liter. Air bersih

disediakan melalui toren dengan kapasitas total 1.040 liter yang mencukupi kebutuhan sehari-hari PKL untuk memasak dan keperluan kebersihan. *Shelter* ini juga dilengkapi dengan meteran listrik berdaya 1.300 watt yang cukup untuk kebutuhan listrik harian para PKL, meskipun penggunaan listrik diatur dengan iuran harian. Terdapat dua toilet yang mampu melayani pengunjung harian hingga 100 orang, yang mencukupi kebutuhan sanitasi di *shelter* tersebut. Lahan parkir seluas 90 m² dapat menampung sekitar 60 kendaraan roda dua dan 7 kendaraan roda empat, sesuai dengan standar minimal SRP yang ditentukan untuk area seluas 900 m². Meskipun sebagian besar pengunjung datang dengan kendaraan roda dua, fasilitas parkir yang ada sudah mencukupi kebutuhan harian.



Gambar 3. Peta Lokasi *Shelter* Rejomulyo



Gambar 4. Fasilitas Pendukung di *Shelter* Rejomulyo

Secara keseluruhan, fasilitas fisik di *Shelter* Rejomulyo cukup memadai untuk mendukung aktivitas berdagang PKL, meskipun aksesibilitas dan potensi kunjungan masyarakat dapat ditingkatkan dengan adanya konektivitas yang lebih baik ke jalur transportasi umum dan lokasi dengan aktivitas yang lebih tinggi. Evaluasi ini menyoroti pentingnya penempatan strategis dan dukungan infrastruktur untuk memaksimalkan potensi *shelter* PKL dalam mendukung ekonomi lokal dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Berikut merupakan tabel analisis skoring kesesuaian *Shelter* Rejomulyo sebagai lokasi *shelter* PKL.

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4, total keseluruhan skor variabel pada lokasi *Shelter* Rejomulyo adalah 3 yang berada dalam rentang skor 2,1 – 3. Dengan demikian, lokasi *Shelter* Rejomulyo dikategorikan sebagai cukup sesuai sebagai lokasi *shelter* PKL. Kesesuaian Lokasi *Shelter* Rejomulyo sebagai lokasi *shelter* PKL didasarkan pada jarak aktivitas utama yang mendukung, keamanan lokasi, serta kelengkapan sarana dan prasarana seperti tempat sampah, air bersih, daya listrik, toilet, dan lahan parkir. Namun, terdapat kelemahan signifikan pada aksesibilitas, terutama karena *shelter* ini tidak dilalui oleh transportasi umum dan tidak memiliki halte atau terminal dalam radius yang dapat dijangkau pejalan kaki. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan aksesibilitas untuk mendukung keterjangkauan lokasi oleh konsumen potensial. Meskipun demikian, kinerja optimal dalam aspek keamanan dan prasarana mampu mempertahankan kategori cukup sesuai yang berpotensi ditingkatkan melalui perbaikan infrastruktur transportasi.

Tabel 4. Analisis Skoring Kesesuaian Shelter Rejomulyo sebagai Lokasi Shelter PKL

Variabel	Indikator	Hasil Analisis Peneliti	Bobot Indikator	Skor Parameter	Skor Variabel
Kedekatan dengan aktivitas utama	Jarak aktivitas utama yang didekati lokasi berdagang PKL	Terdapat aktivitas utama berupa aktivitas permukiman dengan jarak 10 meter dari lokasi <i>Shelter</i> Rejomulyo. Aktivitas utama yang didekati oleh Shelter <i>Kembulsari</i> memiliki jarak 10 meter sehingga indikator jarak aktivitas utama yang didekati termasuk dalam kategori sesuai	1	1	1
Aksesibilitas	Ketersediaan trayek transportasi umum menuju lokasi berdagang PKL	<i>Shelter</i> Rejomulyo tidak dilalui oleh transportasi umum (Angkutan Kota Madiun)	0.5	0	0
Aksesibilitas	Jangkauan sarana pendukung berupa halte atau terminal di sekitar lokasi berdagang PKL	Tidak terdapat halte dan terminal di sekitar <i>Shelter</i> Rejomulyo yang dapat ditempuh dengan jalan kaki sejauh 400 m	0.5	0	0
Keamanan Lokasi	Lokasi aman dari relokasi setiap saat karena lokasi telah ditentukan oleh Pemerintah	Lokasi <i>Shelter</i> Rejomulyo telah termasuk dalam realisasi pembangunan <i>shelter</i> yang dilakukan di 9 Kelurahan di wilayah Kecamatan Kartoharjo (Program pengembangan sarana bagi PKL dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Masterplan Smart City Kota Madiun Tahun 2019-2024) <i>Shelter</i> Kembulsari tergolong aman	0.5	1	0.5
Keamanan Lokasi	Lokasi aman dari tindak kriminalitas	Masyarakat dan PKL di <i>Shelter</i> Rejomulyo bergotong royong menjaga keamanan serta tidak pernah terjadi tindak kriminalitas pada lokasi <i>Shelter</i> Rejomulyo	0.5	1	0.5
Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pendukung	Ketercukupan tempat sampah	Total timbunan sampah yang dihasilkan kurang lebih sekitar 180 liter per hari. Kapasitas tempat sampah yang terdsedia 460 liter Kapasitas tong sampah yang tersedia di <i>Shelter</i> Rejomulyo mampu menampung semua sampah yang dihasilkan dari aktivitas berdagang PKL sehari-hari	0.2	1	0.2
Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pendukung	Ketercukupan kuantitas air bersih	Kesuluruhan 8 kios pada <i>Shelter</i> Rejomulyo membutuhkan kurang lebih 360 liter air bersih. Kapasitas air sebanyak 1.040 liter yang ditampung pada toren air. Kebutuhan air bersih pada lokasi <i>Shelter</i> Rejomulyo terbilang mencukupi	0.2	1	0.2
Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pendukung	Ketercukupan daya listrik	Tidak pernah terjadi pemadaman selama aktivitas berdagang berlangsung, bahkan ketika para PKL menggunakan peralatan listrik secara bersamaan. Daya listrik pada lokasi <i>Shelter</i> Rejomulyo terbilang mencukupi.	0.2	1	0.2
Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pendukung	Ketercukupan kebutuhan toilet	Terdapat 2 toilet di <i>Shelter</i> Rejomulyo. Ketersediaan fasilitas toilet pada <i>Shelter</i> Rejomulyo telah mencukupi kebutuhan baik dari pedagang maupun pengunjung untuk aktivitas berdagang PKL sehari-hari.	0.2	1	0.2
Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pendukung	Ketercukupan lahan parkir	<i>Shelter</i> Rejomulyo menyediakan lahan parkir sebesar 60 SRP untuk kendaraan roda dua atau 7 SRP kendaraan roda empat dalam satu waktu. Standar minimal satuan ruang parkir untuk 1.000 m2 lahan yakni 59 SRP. Shelter Rejomulyo dengan total luas 900 m2 harus menyediakan minimal 53 SRP. Lahan parkir	0.2	1	0.2

Variabel	Indikator	Hasil Analisis Peneliti	Bobot Indikator	Skor Parameter	Skor Variabel
		pada Shelter Rejomulyo telah mencukupi kebutuhan lahan parkir untuk kendaraan roda dua saat aktivitas berdagang PKL sehari-hari.			
Total					3
Klasifikasi Kesesuaian					Cukup Sesuai

4.3 KESESUAIAN *SHELTER* KAMPIR SEBAGAI LOKASI *SHELTER* PKL DI KAWASAN PERKOTAAN MADIUN

Shelter Kampir memiliki luas 2.000 m² dan berlokasi dekat dengan permukiman dan lapangan olahraga, yang memberikan potensi kunjungan yang tinggi. Meskipun tidak dilalui angkutan umum, aksesibilitasnya didukung oleh jalan lokal yang memperlambat kendaraan, memungkinkan kunjungan dengan moda transportasi pribadi. *Shelter* ini dihuni oleh 10 PKL yang menyediakan makanan dan minuman siap saji, dengan kios berukuran 3x3 m².



Gambar 5. Peta Lokasi Shelter Kampir



Gambar 6. Fasilitas Pendukung di Shelter Kampir

Fasilitas fisik termasuk tempat sampah yang cukup dan gerobak sampah berkapasitas 840 liter, cukup untuk menampung sampah harian. Kebutuhan air bersih dipenuhi oleh PDAM, mencukupi kebutuhan PKL dan toilet yang tersedia. Namun, terdapat keterbatasan fasilitas hanya satu toilet untuk 90-100 pengunjung harian sehingga dapat menimbulkan antrian. Ketersediaan listrik dengan daya 1.300 watt dirasa kurang mencukupi, sering terjadi pemadaman saat peralatan digunakan bersamaan. Selain itu, lahan parkir sebesar 90 m² hanya mampu menampung 60 kendaraan roda dua dan 5 kendaraan roda empat, yang tidak memenuhi standar minimal lahan parkir yang diperlukan. Meskipun demikian, lokasi strategis *Shelter* Kampir mendukung aktivitas PKL dan menarik kunjungan masyarakat, namun perlu penambahan fasilitas pendukung seperti toilet, listrik yang lebih memadai, dan lahan parkir yang lebih luas untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung dan kesesuaian *shelter* sebagai tempat usaha PKL. Ketidacukupan daya listrik

dapat menyebabkan pemadaman saat aktivitas berdagang berlangsung serta dapat mengganggu kenyamanan pedagang dan pelanggan, sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas jaringan listrik. Selain itu, keterbatasan lahan parkir dapat membatasi jumlah pengunjung dan memengaruhi potensi ekonomi *shelter* ini. Untuk meningkatkan kategori kesesuaian lokasi, pengadaan fasilitas transportasi umum serta pengelolaan infrastruktur yang lebih baik menjadi prioritas yang perlu dipertimbangkan.

Tabel 5 menyajikan analisis skoring kesesuaian *Shelter* Kampir sebagai lokasi *shelter* PKL. Dari tabel tersebut, diketahui bahwa total keseluruhan skor variabel pada lokasi *Shelter* Kampir adalah 2,6 yang berada dalam rentang skor 2,1–3. Dengan demikian, lokasi *Shelter* Kampir termasuk dalam kategori cukup sesuai sebagai lokasi *shelter* PKL. *Shelter* ini memiliki kesesuaian dalam kedekatan dengan aktivitas utama serta kelengkapan sarana seperti tempat sampah, kuantitas air bersih, dan kebutuhan toilet. Namun, terdapat beberapa kekurangan, antara lain keterbatasan daya listrik, ketersediaan lahan parkir yang belum mencukupi, serta tidak adanya akses transportasi umum dan fasilitas halte atau terminal terdekat.

Tabel 5. Analisis Skoring Kesesuaian *Shelter* Kampir sebagai Lokasi *Shelter* PKL

Variabel	Indikator	Hasil Analisis Peneliti	Bobot Indikator	Skor Parameter	Skor Variabel
Kedekatan dengan aktivitas utama	Jarak aktivitas utama yang didekati lokasi berdagang PKL	Aktivitas utama berupa aktivitas permukiman yang berjarak 30 meter dari lokasi <i>Shelter</i> Kampir. Aktivitas utama zona ruang terbuka berupa lapangan olahraga yang berjarak 40 meter dari lokasi <i>shelter</i> . Jarak aktivitas utama sesuai yakni 0 – 50 meter dari lokasi <i>shelter</i> PKL sehingga indikator jarak aktivitas utama yang didekati termasuk dalam kategori sesuai	1	1	1
Aksesibilitas	Ketersediaan trayek transportasi umum menuju lokasi berdagang PKL	<i>Shelter</i> Kampir tidak dilalui oleh transportasi umum (Angkutan Kota Madiun)	0.5	0	0
Aksesibilitas	Jangkauan sarana pendukung berupa halte atau terminal di sekitar lokasi berdagang PKL	Tidak terdapat halte dan terminal di sekitar <i>Shelter</i> Kampir yang dapat ditempuh dengan jalan kaki sejauh 400 m	0.5	0	0
Keamanan Lokasi	Lokasi aman dari relokasi setiap saat karena lokasi telah ditentukan oleh Pemerintah	Lokasi <i>Shelter</i> Kampir termasuk dalam realisasi pembangunan <i>shelter</i> yang dilakukan di 9 Kelurahan di wilayah Kecamatan Kartoharjo (Program pengembangan sarana bagi PKL dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Masterplan Smart City Kota Madiun Tahun 2019-2024)	0.5	1	0.5
Keamanan Lokasi	Lokasi aman dari tindak kriminalitas	<i>Shelter</i> Kampir tergolong aman. Seluruh PKL pada <i>Shelter</i> Kampir bekerja sama menjaga keamanan serta tidak pernah terjadi tindak kriminalitas pada lokasi <i>Shelter</i> Kampir	0.5	1	0.5
Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pendukung	Ketercukupan tempat sampah	Timbulan sampah yang dihasilkan oleh PKL pada lokasi <i>Shelter</i> Kampir kurang lebih sekitar 240 liter. Kapasitas gerobak sampah yang tersedia pada lokasi <i>Shelter</i> Kampir kurang lebih 840 liter. Kapasitas gerobak sampah yang tersedia di <i>Shelter</i> Kampir mampu menampung semua sampah yang dihasilkan dari aktivitas berdagang PKL sehari-hari	0.2	1	0.2
Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pendukung	Ketercukupan kuantitas air bersih	Keseluruhan kios membutuhkan kurang lebih 450 liter air bersih. Air dihasilkan oleh PDAM untuk memenuhi kebutuhan aktivitas secara keseluruhan terbilang sangat mencukupi	0.2	1	0.2
Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Ketercukupan daya listrik	Daya listrik pada lokasi <i>Shelter</i> Kampir belum mencukupi kebutuhan listrik PKL. Hal ini dikarenakan masih sering terjadi pemadaman	0.2	0	0

Variabel	Indikator	Hasil Analisis Peneliti	Bobot Indikator	Skor Parameter	Skor Variabel
Pendukung		apabila para PKL menggunakan peralatan listrik secara bersamaan <i>Shelter</i> Kampir hanya memiliki 1 toilet.			
Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pendukung	Ketercukupan kebutuhan toilet	Ketersediaan toilet pada <i>Shelter</i> Kampir dapat mencukupi kebutuhan toilet untuk aktivitas berdagang PKL sehari-hari dikarenakan lama kunjungan masyarakat tergolong singkat sehingga tidak akan menyebabkan antrian panjang saat pedagang atau pengunjung akan menggunakan toilet	0.2	1	0.2
Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pendukung	Ketercukupan lahan parkir	<i>Shelter</i> Kampir menyediakan lahan parkir 60 SRP untuk kendaraan roda dua atau 5 SRP kendaraan roda empat dalam satu waktu Standar minimal satuan ruang parkir untuk 1.000 m ² yakni 59 SRP. <i>Shelter</i> Kampir dengan total luas 2.000 m ² harus menyediakan minimal 118 SRP. Lahan parkir di <i>Shelter</i> Kampir belum mencukupi kebutuhan lahan parkir untuk kendaraan roda dua saat aktivitas berdagang PKL sehari-hari	0.2	0	0
Total				2.6	
Klasifikasi Kesesuaian				Cukup Sesuai	

4.4 KESESUAIAN *SHELTER* BANJAREJO SEBAGAI LOKASI *SHELTER* PKL DI KAWASAN PERKOTAAN MADIUN

Shelter Banjarejo, yang terletak di Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, memiliki luas 774 m² dan berdekatan dengan lahan pertanian, sehingga tingkat keramaiannya rendah dan pengunjung umumnya adalah pelanggan tetap. Letaknya yang jauh dari aktivitas utama seperti permukiman dan perkantoran membuat interaksi dan potensi kunjungan masyarakat ke *shelter* ini terbatas, meskipun dilalui oleh jalan lokal yang menghubungkan antar permukiman. *Shelter* ini tidak dilalui oleh angkutan kota, sehingga pengunjung lebih banyak menggunakan transportasi pribadi. Terdapat 5 PKL di *shelter* ini yang menempati kios berukuran 3x3 m², menyediakan makanan dan minuman siap saji.



Gambar 7. Peta Lokasi Shelter Banjarejo



Gambar 8. Fasilitas Pendukung di Shelter Banjarejo

Tempat sampah yang tersedia mampu menampung seluruh sampah yang dihasilkan setiap hari, dan air bersih diperoleh dari sumur dengan toren berkapasitas 520 liter, yang cukup untuk kebutuhan harian. Listrik disuplai dengan daya 1.300 watt, dan meskipun keterbatasan daya tersebut, tidak pernah terjadi pemadaman saat peralatan listrik digunakan bersamaan. *Shelter* ini juga memiliki satu toilet yang cukup untuk melayani 60-90 pengunjung harian, sesuai dengan parameter yang telah ditentukan. Lahan parkir seluas 100 m² mampu menampung 66 kendaraan roda dua dan 8 kendaraan roda empat, yang memenuhi standar minimal SRP yang dibutuhkan. Secara keseluruhan, meskipun terletak jauh dari aktivitas utama, *Shelter* Banjarejo cukup memenuhi kebutuhan dasar bagi PKL dan pengunjung, namun potensi kunjungan masyarakat dari luar lingkungan tetap rendah karena faktor lokasi dan aksesibilitas. Tabel 6 merupakan tabel analisis skoring kesesuaian *Shelter* Banjarejo sebagai lokasi *shelter* PKL.

Total keseluruhan skor variabel pada lokasi *Shelter* Banjarejo adalah 2 yang berada dalam rentang skor 1,1–2. Dengan demikian, lokasi *Shelter* Banjarejo termasuk dalam kategori kurang sesuai sebagai lokasi *shelter* PKL. Beberapa indikator menunjukkan kesesuaian, seperti kecukupan tempat sampah, kuantitas air bersih, daya listrik, dan kebutuhan toilet, yang mencukupi untuk mendukung aktivitas PKL. Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah jarak aktivitas utama yang tidak sesuai, dengan aktivitas utama terdekat berada lebih dari 50 meter, yang dapat mengurangi daya tarik lokasi *shelter* bagi PKL dan pelanggan. Selain itu, tidak adanya akses transportasi umum atau halte di sekitar *shelter* juga menjadi kelemahan utama, yang membatasi aksesibilitas bagi pengunjung dan pedagang. Keterbatasan fasilitas transportasi umum, meskipun lokasi *shelter* sudah ditetapkan dalam program pemerintah, menunjukkan pentingnya penyesuaian infrastruktur untuk mendukung kelancaran akses. Oleh karena itu, agar *shelter* ini lebih sesuai bagi kegiatan PKL, perlu adanya pengembangan jaringan transportasi atau peningkatan aksesibilitas yang lebih mudah ke lokasi tersebut.

Tabel 6. Analisis Skoring Kesesuaian Shelter Banjarejo sebagai Lokasi Shelter PKL

Variabel	Indikator	Hasil Analisis Peneliti	Bobot Indikator	Skor Parameter	Skor Variabel
Kedekatan dengan aktivitas utama	Jarak aktivitas utama yang didekati lokasi berdagang PKL	Aktivitas utama terdekat yakni lahan pertanian dengan jarak 10 meter dari lokasi <i>shelter</i> . Terdapat aktivitas perkantoran dengan jarak 600 meter serta aktivitas permukiman yang berjarak 200 meter dari lokasi <i>shelter</i> . Aktivitas utama dekat <i>Shelter</i> Kembulsari memiliki jarak 600 meter dan 200 meter sehingga indikator jarak aktivitas utama yang didekati oleh lokasi <i>shelter</i> termasuk dalam kategori tidak sesuai.	1	0	0
Aksesibilitas	Ketersediaan trayek transportasi umum menuju lokasi berdagang PKL	<i>Shelter</i> Banjarejo tidak dilalui oleh transportasi umum (Angkutan Kota Madiun)	0.5	0	0
Aksesibilitas	Jangkauan sarana pendukung berupa halte atau terminal di sekitar lokasi berdagang PKL	Tidak terdapat halte dan terminal di sekitar <i>Shelter</i> Banjarejo yang dapat ditempuh dengan jalan kaki sejauh 400 m	0.5	0	0
Keamanan Lokasi	Lokasi aman dari relokasi setiap	Lokasi <i>Shelter</i> Banjarejo telah termasuk dalam realisasi pembangunan <i>shelter</i> yang dilakukan di	0.5	1	0.5

Variabel	Indikator	Hasil Analisis Peneliti	Bobot Indikator	Skor Parameter	Skor Variabel
Keamanan Lokasi	saat karena lokasi telah ditentukan oleh Pemerintah	7 Kelurahan di wilayah Kecamatan Taman (Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Masterplan Smart City Kota Madiun Tahun 2019-2024)	0.5	1	0.5
	Lokasi aman dari tindak kriminalitas	<i>Shelter</i> Banjarejo tergolong aman. Sejauh ini, tidak pernah terjadi tindak kriminalitas pada lokasi <i>Shelter</i> Banjarejo			
Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pendukung	Ketercukupan tempat sampah	Timbulan sampah yang dihasilkan kurang lebih sekitar 100 liter. Kapasitas tempat sampah yang tersedia di <i>Shelter</i> Banjarejo yakni kurang lebih 840 liter. Kapasitas gerobak sampah yang tersedia di <i>Shelter</i> Banjarejo mampu menampung semua sampah yang dihasilkan aktivitas berdagang PKL sehari-hari.	0.2	1	0.2
Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pendukung	Ketercukupan kuantitas air bersih	Keseluruhan 5 kios di <i>Shelter</i> Banjarejo membutuhkan kurang lebih 225 liter air bersih setiap harinya. Kapasitas air sebanyak 520 liter yang ditampung pada toren air. Kebutuhan air bersih pada lokasi <i>Shelter</i> Banjarejo terbilang mencukupi.	0.2	1	0.2
Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pendukung	Ketercukupan daya listrik	Tidak pernah terjadi pemadaman meskipun PKL menggunakan peralatan listrik secara bersamaan. Ketercukupan daya listrik pada lokasi <i>Shelter</i> Banjarejo terbilang mencukupi. <i>Shelter</i> Banjarejo hanya memiliki 1 toilet.	0.2	1	0.2
Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pendukung	Ketercukupan kebutuhan toilet	Ketersediaan toilet pada <i>Shelter</i> Banjarejo dapat mencukupi kebutuhan toilet untuk aktivitas berdagang PKL sehari-hari dikarenakan durasi kunjungan masyarakat tergolong singkat sehingga tidak akan menyebabkan antrean panjang saat pedagang atau pengunjung akan menggunakan toilet	0.2	1	0.2
Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pendukung	Ketercukupan lahan parkir	<i>Shelter</i> Banjarejo menyediakan lahan parkir 66 SRP untuk kendaraan roda dua atau 8 SRP kendaraan roda empat dalam satu waktu. Standar minimal SRP untuk 1.000 lahan yakni 59 SRP. <i>Shelter</i> Banjarejo dengan total luas 774m ² harus menyediakan minimal 46 SRP. Lahan parkir pada <i>Shelter</i> Banjarejo telah mencukupi kebutuhan lahan parkir untuk kendaraan roda dua saat aktivitas berdagang PKL sehari-hari.	0.2	1	0.2
Total			2		
Klasifikasi Kelas			Kurang Sesuai		

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis kesesuaian lokasi *shelter* Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Perkotaan Madiun, dengan hasil menunjukkan variasi dalam kesesuaian lokasi berdasarkan fasilitas dan aksesibilitas. *Shelter* Kembulsari dinilai cukup sesuai meski memiliki fasilitas memadai, namun jaraknya yang jauh dari aktivitas utama mengurangi potensi aliran pelanggan. *Shelter* Rejomulyo, meskipun berlokasi dekat permukiman, kurangnya aksesibilitas transportasi umum menjadi kelemahan utama. *Shelter* Kampir memiliki keunggulan lokasi dekat permukiman dan lapangan olahraga, namun kurangnya fasilitas daya listrik dan aksesibilitas dapat mempengaruhi kesediaan PKL untuk berdagang pada lokasi tersebut. *Shelter* Banjarejo dinilai kurang sesuai karena jaraknya yang jauh dari aktivitas utama yang produktif dan minimnya akses transportasi umum. Temuan ini menunjukkan bahwa kedekatan dengan aktivitas utama yang produktif dan aksesibilitas transportasi umum sangat mempengaruhi kesesuaian lokasi *shelter* PKL, di mana fasilitas dasar yang memadai tidak cukup untuk menjamin keberhasilan tanpa lokasi yang strategis dan mudah diakses pelanggan. Untuk itu, perbaikan aksesibilitas dan pemilihan lokasi yang tepat sangat penting bagi stabilitas

dan keberlanjutan usaha PKL di Kawasan Perkotaan Madiun. Temuan ini dapat membantu pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengelola *shelter* PKL dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, serta sebagai referensi untuk meningkatkan infrastruktur transportasi dan penataan kawasan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan yang terbatas dan fokus hanya pada fasilitas dan aksesibilitas, tanpa mempertimbangkan faktor sosial-ekonomi yang dapat mempengaruhi keberhasilan *shelter*. Penelitian lebih lanjut yang mencakup lebih banyak variabel dan kawasan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif bagi pengelolaan PKL yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adonis, D. (2023). *Penataan Kawasan Kuliner Pedagang Kaki Lima Seafood di Pasar Malam Kampung Solor Kota Kupang-NTT*. Insitut Teknologi Nasional Malang.
- Amalia, A., Rahayu, M. J., & Utomo, R. P. (2023). Kawasan Alun-Alun Timur Pati sebagai Lokasi Relokasi Pedagang Kaki Lima. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 18(2), 468–486. <https://doi.org/10.20961/region.v18i2.63760>
- Bromley, R. (2000). Street Vending and Public Policy: a Global Review. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 20(1–2), 1–28. <https://doi.org/10.1108/01443330010789052>
- Demas, K. L. A. M., & Dewanti, A. N. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Pemilihan Lokasi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Pagi, Kota Samarinda. *Jurnal Ruang*, 7(2), 96–104. <https://doi.org/10.14710/ruang.7.2.96-104>
- Dewi, S., Listyowati, D., & Napitupulu, B. E. (2020). Sektor Informal dan Kemajuan Teknologi Informasi di Indonesia. *Jurnal Mitra Manajemen*, 11(1), 29–38. <https://doi.org/10.35968/jmm.v11i1.391>
- Febrianto, E. N. (2020). Hubungan Sektor Informal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *JPE Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 14(1), 151–158. <https://doi.org/10.19184/jpe.v14i1.16620>
- Firdaus, S. A., Ilham, I. F., Aqidah, L. P., Firdaus, S. A., Astuti, S. A. D., & Buchori, I. (2020). Strategi UMKM untuk Meningkatkan Perekonomian selama Pandemi Covid-19 pada saat New Normal. *OECOMICUS Journal of Economics*, 5(1), 46–62. <https://doi.org/10.15642/oje.2020.5.1.46-62>
- Kristian, I. (2021). Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Kiara Condong Kota Bandung. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 23–34. <https://doi.org/10.63309/dialektika.v19i2.4>
- Lahengko, D. S., & Suryono. (2023). Sistem Tata Kelola Perdagangan dan Jasa Sektor Informal di Kecamatan Tuminting Kota Manado. *Sabua*, 12(1), 60–69.
- Mandasari, L., Rahmadhani, E., & Wahyuni, S. (2020). Efektivitas Perkuliahan Daring pada Mata Kuliah Analisis Kompleks Selama Pandemi Covid 19. *Jurnal As-Salam*, 4(2), 269–283. <https://doi.org/10.37249/as-salam.v4i2.205>
- McGee, T. G., & Yeung, Y. M. (1977). *Hawkers in Southeast Asian Cities: Planning for the Bazaar Economy*. IDRC, Ottawa, ON, CA.
- Nazihah, U., Rahayu, M. J., & Suminar, L. (2024). Kesesuaian Teras 1 Malioboro sebagai Lokasi Relokasi Pedagang Kaki Lima Malioboro Yogyakarta. *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 4(2), 261–273.
- Nisa, H. (2021). *Arahan Penentuan Kriteria Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sepanjang Koridor Jalan Jenderal Sudirman Berdasarkan Preferensi PKL Kawasan Lapangan Merdeka dan Pantai Melawai*. Insitut Teknologi Kalimantan.
- Perdana, E. A. L., Rahayu, P., & Hardiana, A. (2020). Karakteristik Pedagang Kaki Lima dan Preferensinya terhadap Lokasi Kawasan Solo Techno Park. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 15(2), 172–188.
- Rahayu, M. J. (2020). *Stabilisasi Pedagang Kaki Lima di Ruang Publik Kota Surakarta*. Yayasan Kita Menulis.
- Rahayu, M. J., Buchori, I., & Widjajanti, R. (2019). The Need for The Improvement of Street Vendors Management in Public Spaces at Surakarta City. *Journal of the Malaysian Insitute of Planners*, 17(2), 146–157. <https://doi.org/10.21837/pmjjournal.v17.i10.636>
- Rahayu, M. J., Buchori, I., & Widjajanti, R. (2020). Upaya Penataan Lingkungan Sosial dan Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta Berdasarkan Tipologi Lokasi Stabilisasi Surakarta. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 8(1), 51–66. <https://doi.org/10.14710/jwl.8.1.51-66>
- Riyanto, A. F. (2020). *Kajian Sebaran dan Karakteristik PKL Bermobil di Kota Bandung*. Insitut Teknologi Nasional Bandung.
- Rudi, H. (2023). *Peraturan Terhadap Pedagang Kaki Lima Ditinjau Menurut Permenkop Ukm Ri No.16 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima*. UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum.
- Sedyastuti, K. (2018). Analisis Pemberdayaan UMKM Dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancan Pasar Global. *INOBIIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 2(1), 117–127. <https://doi.org/10.31842/jurnal-inobis.v2i1.65>
- Setyaningrum, W., Pandelaki, E. E., & Suprati, A. (2021). Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pusat Kota Pekalongan. *Sinekika: Jurnal Arsitektur*, 18(2), 160–168. <https://doi.org/10.23917/sinekika.v18i2.15327>
- Sriharyati, S., & Marlina, M. (2021). Penataan Pasar Sebagai Upaya Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Sindangkerta Kabupten Bandung Barat. *ATRBIS Jurnal Administrasi Bisnis*, 7(1), 75–85. <https://doi.org/10.38204/atrabis.v7i1.549>
- Widjajanti, R., Sunarti, S., & Tyas, W. P. (2017). Pola Sebaran Ruang Aktivitas PKL di Ruang Publik Kawasan Pecinan Semarang. *TATALOKA*, 19(3), 242–255. <https://doi.org/10.14710/tataloka.19.3.242-255>
- Widjajanti, R., & Wahyono, H. (2018). Space Livability of Street Vendors in Simpang Lima Public Space, Semarang. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/123/1/012045>
- Widodo, A. (2000). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus: Kota Semarang)*. Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.